

Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial Di Pedesaan

Tri Sela Andani¹, Muhammad Ridho Saputra², Yustina Sri Ekwandari³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
selaandani10@gmail.com

Abstract

In 1870 was a final stage of forced cultivation. An important law was passed that year, namely the agrarian law, which was to regulate private entrepreneurs in acquiring land. And also issued sugar law that regulates the transfer of sugar companies into the hands of the private sector. With the end of this forced cultivation, then the implementation in Indonesia of a liberal colonial politics or liberal economy. The liberal economic system is an economic system which in its implementation gives freedom to its people so that they can carry out economic activities or can run a business and will get as much profit as possible. This liberal economic system also highly upholds ownership rights to an individual and in market competition. With the liberation of economic life from all interventions to promote government and eliminate coercive elements of economic life the economic development of the Dutch East Indies. This liberal era led to deeper economic penetration into the life of Indonesia society, especially in Java. The Javanese indigenous people began to lease land to private Dutch parties.

Keywords: Liberal economy, colonial period, forced cultivation rural in Java.

Abstrak

Pada tahun 1870 merupakan sebuah tahapan akhir dari adanya tanam paksa. Undang-undang penting disahkan pada tahun itu, yaitu undang-undang agrarian, yaitu untuk mengatur para pengusaha swasta untuk mendapatkan tanah. Dan juga dikeluarkannya hukum gula yang mengatur pengalihan perusahaan gula ketangan para swasta. dengan berakhirnya tanam paksa ini, kemudian diterapkannya di Indonesia sebuah politik kolonial liberal atau ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sebuah sistem ekonomi yang dimana dalam pelaksanaannya memberikan sebuah kebebasan terhadap masyarakatnya agar dapat melakukan aktivitas ekonomi atau dapat menjalankan usaha dan akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi liberal ini juga sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan pada suatu individu dan dalam persaingan pasar. Dengan adanya pembebasan kehidupan ekonomi dari segala intervensi untuk mempromosikan pemerintah dan menghilangkan unsur-unsur koersif kehidupan ekonomi perkembangan ekonomi Hindia-Belanda. Pada era liberal ini menyebabkan penetrasi ekonomi yang lebih dalam kedalam kehidupan pada masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Para masyarakat penduduk pribumi Jawa mereka mulai menyewakan tanah kepada pihak swasta Belanda.

Kata kunci: Ekonomi liberal, masa kolonial, tanam paksa, pedesaan di Jawa

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara tersebut, seperti alokasi sumber dayanya, praktik produksi, distribusi kepada individu dan organisasi di negara tersebut, dan konsumsi. Berikut ini dapat dikatakan tentang sistem ekonomi sebagai keseluruhan: Sebagai metode komprehensif untuk mengatur cara berperilaku masyarakat (pelanggan, pembuat,

pemerintah, bank dan lain-lain) dalam melakukan kegiatan keuangan (penciptaan, sirkulasi, pemanfaatan, usaha, dan sebagainya), dapat menghindari kekacauan dengan menjadi kesatuan yang teratur dan utuh.

Garis ekonomi liberal dipraktikkan oleh sekolah-sekolah Australia dalam bentuk demokrasi dalam masyarakat terbuka. Liberalisme terutama digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika continental, dan di

Amerika Serikat Liberalisme dikenal sebagai *mild leftism established*. Teori-teori dasar ekonomi liberal telah mulai dikembangkan

Menentang merkantilisme dan feodalisme sejak awal abad ke-19. Adam Smith adalah orang pertama yang mengusulkan teori ini, dengan alasan bahwa pasar tidak boleh diatur secara berlebihan oleh pemerintah. Adam Smith berpendapat bahwa hasil akan lebih harmonis, sosial, dan sejahtera ketika setiap orang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka sendiri dan tidak dikendalikan oleh negara. Berakhirnya sistem ekonomi kapitalis dan merkantilistik pada akhir abad ke-18 mendukung teori ini (Nasution, Z. 2008).

Dari Adam Smith hingga saat ini, para pemikir liberal telah berusaha menemukan konsep dan aturan hukum yang dapat mengatur kekayaan ekonomi suatu negara. Kebanyakan pemikir liberal berpendapat bahwa hukum dan peraturan tentang sistem ekonomi sudah ada dalam sistem sosial masyarakat dan menjadi alami, tetapi interpretasi manusia berasal dari apa yang diproyeksikan oleh panca indera dan proyeksi ini membentuk gagasan, dan gagasan tersebut dirangkai melalui bahasa pengetahuan dalam bentuk teks. Sejalan dengan pandangan Adam Smith, semua pelaku ekonomi (baik konsumen maupun produsen) harus diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya sendiri. Konsumen bebas memilih kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan maksimal dari berbagai jenis barang dan jasa sesuai dengan preferensi dan kekuatan finansial mereka. Demikian pula, produsen bebas memilih input dan teknologi berbeda dengan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan berbagai jenis dan layanan yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka. Salah satu ansumsi kunci dari

Sistem Ekonomi Liberal Adam Smith adalah bahwa setiap orang bebas melakukan apa yang terbaik untuk mereka. (Petras, J., & Veltmeyer, H. 2001).

Cultur stelsel menghadapi berbagai masalah pada tahun 1840. Diantara orang Jawadan Sunda, tanda-tanda penderitaan pertama terlihat, terutama didaerah penanaman tebu. Undang-Undang Liberal tahun 1848 memberi parlemen Belanda pengaruh pertama colonial itu, dan debat politik di Belanda menghasilkan penghapusan penanaman paksa. Oleh karena itu, setelah tahun 1870 penanaman paksa dihentikan, dan sebaliknya pemerintah colonial Belanda memperkenalkan sistem liberalisme sebagai sistem ekonomi Hindia Belanda dari tahun 1970 hingga 1900. Diadakannya sistem ekonomi liberal ini memberikan pengaruh juga terhadap pedesaan-pedesaan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah artikel yang menggunakan metode kepustakaan. Artikel kepustakaan bertujuan memberikan deskripsi perkembangan terbaru berkaitan dengan suatu hal yang spesifik, yang dapat memberikan perspektif baru, dengan menyuguhkan gap penelitian atau pendapat yang sudah ada, atau sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya, dan tidak hanya sekedar mengumpulkan pustaka yang ada dan relevan dengan topic yang akan dibicarakan. Oleh karena itu, artikel ini memberikan hal-hal tersebut yang terkait dengan sastra bandingan.

Untuk mendemonstrasikan secara tepat keberadaan sejumlah sudut pandang yang berbeda, artikel tinjauan pustaka menggunakan secara tepat semua dokumen dan informasi yang tersedia saat ini. Hal ini memungkinkan perbandingan poin-poin yang berbeda untuk memberikan ringkasan

perkembangan terkini dan potensi sintesis dari perkembangan tersebut. Dokumen dan informasi yang dapat diakses dalam konteks artikel ini mencakup berbagai buku dan artikel dari yang dipilih, sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kritik Terhadap Privatisasi

“Minimalkan peran negara dan serahkan semuanya pada kendali pasar” adalah beberapa kata yang selalu digambarkan oleh para pemikir liberal ini. Dalam bidang ekonomi, penerapan liberalisme berarti membebaskan ruang perdagangan suatu negara untuk barang dan jasa agar dapat diakses seluas-luasnya oleh pelaku ekonomi dalam dan luar negeri. Negara diharapkan ada, tetapi hanya sebagai perantara untuk memastikan bahwa mekanisme pasar melakukan apa yang seharusnya. Pemerintah harus mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan tarif dan non-tarif untuk memastikan perdagangan barang dan jasa yang bebas dan kompetitif antar negara. Pendek kata, liberalisasi lebih ditujukan untuk mempercepat arus barang, jasa dan modal serta menciptakan struktur pasar bebas yang kompetitif di mana para pelaku pasar dapat berinteraksi dalam persaingan usaha yang sehat (Chorie, 2004: 35-36).

Ketika kita Berbicara tentang liberalisasi, kita berbicara tentang privatisasi. Privatisasi secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dengan menawarkan berbagai fasilitas yang memudahkan pihak swasta untuk mengakuisisi badan usaha milik negara (Krisna, 1993: 131). Privatisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan mengurangi peran negara dalam kegiatan ekonomi dan kepemilikan properti, atau meningkatkan

peran sektor swasta (Savas, 1987: 3). Semua ini dilakukan untuk melakukan tiga kegiatan. Pertama, kegiatan pengalokasian faktor produksi dan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara efektif oleh mekanisme pasar. Misalnya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan keadilan. Kedua, kegiatan yang meredistribusi atau mentransfer pendapatan. Ini mengoreksi distribusi pendapatan orang. Ketiga, kegiatan stabilisasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kebijakan moneter dan tindakan fiskal dan perdagangan lainnya untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan agregat, mempertahankan kesempatan kerja penuh, dan menghindari inflasi dan deflasi (Musgrave, 1991: 6).

Sekilas terlihat bagus, tetapi pada dasarnya keuntungan privatisasi akan dikembalikan kepada rakyat dan kenyamanan akan diberikan kepada mereka. Isu-isu politik, ekonomi dan etika yang serius telah menarik perhatian pada alasan dan proses di balik "privatisasi" BUMN. Salah satu alasan utama privatisasi adalah untuk mengakhiri “monopoli” negara untuk merangsang persaingan, menurunkan harga dan meningkatkan efisiensi. Namun, situasinya sangat berbeda. Pembeli monopoli negara telah menjadi monopoli swasta, dengan investor besar mendorong kerajaan bisnis mereka yang berkembang. Dengan deregulasi yang datang dengan privatisasi, monopoli swasta baru menaikkan harga, memotong layanan kepada mereka yang tidak mampu membayar, dan menciptakan "inefisiensi" dalam memenuhi permintaan yang sebenarnya. Persaingan selalu privatisasi.

Privatisasi hanya mengkonsentrasikan kepemilikan di tangan swasta. Ini sangat negatif. Karena aspek negatif pada akhirnya tidak hanya datang dari sudut pandang ekonomi, tetapi dari masyarakat secara keseluruhan: sistem politik, struktur kelas, pasar internal, sistem transportasi dan komunikasi terpolarisasi. Di satu sisi, pembeli milik negara biasanya menghasilkan keuntungan besar, mengubah beberapa jutawan menjadi miliarder. Sementara itu, pemecatan pegawai negeri 'redundan' telah mendorong banyak pekerja ke dalam lapisan kemiskinan perkotaan baru dan pekerjaan 'informal' berupah rendah. Dengan sedikitnya keamanan dan kesejahteraan nasional, para pekerja mengalami penurunan standar hidup yang parah dan mobilitas yang berkurang. Penurunan tunjangan kesejahteraan telah meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi pemilik swasta baru.

Naiknya harga, Jasa, listrik, transportasi, Privatisasi yang disertai dengan privatisasi menurunkan standar hidup penerima upah dan meningkatkan keuntungan dari monopoli swasta yang membajak monopoli negara. 'Jadwal kerja yang ditetapkan oleh negara-negara liberal' yang fleksibel. Keuntungan besar' puluhan miliarder terkait dengan proses privatisasi menyebabkan marginalisasi jutaan pekerja miskin yang menderita Dampak besar kedua dari privatisasi adalah sistem politik.

Pertama, privatisasi meniadakan sumber akumulasi ekonomi nasional yang menguntungkan, khususnya ketika para investor baru mengirim penghasilannya ke Bahkan saat ini 4.444 BUMN sangat senang ketika memutuskan untuk go public. Itu hanya "gila". Namun sebaliknya, tatanan liberal yang benar-benar mengglobal dan menjadi dominasi mutlak dunia memaksa bangsa-

bangsa di dunia untuk memutuskan diri dari dampak privatisasi ini.

B. IMF Dan Bank Dunia Sebagai Agen Libera lisasi

Sebenarnya, Perang Dunia Kedua adalah awal dari gagasan untuk mendirikan organisasi internasional yang berfokus pada masalah ekonomi seperti IMF dan Bank Dunia. Henry Morgenthau, Sekretaris Keuangan Amerika Serikat, juga mengungkapkan pemikirannya tentang topik ini. Dia berkata bahwa dia tidak memikirkan tentang Perang Dunia Kedua melainkan tentang apa yang akan terjadi pada perekonomian setelah itu. Eropa khususnya telah menyadari bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang akan menimpa sejumlah negara di dunia dan pembangunan Eropa pasca Perang Dunia II akan menimbulkan kehancuran. Berbagai bidang, termasuk ekonomi. kelompok yang mampu menopang dan mengatasi kehidupan ekonomi negara-negara anggotanya, yang dipimpin oleh negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi, seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang memiliki kekuatan ekonomi sejak bergabung dengan blok tersebut pada Perang Dunia Ke-II.

Pada akhirnya, gagasan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, pada masa peredaan Perang Dunia II. Setelah perang yang menghancurkan, mereka sangat prihatin dengan rekonstruksi Eropa dan sistem ekonomi global.

Kondisionalitas tersebut umumnya mencakup penyesuaian (devaluasi) mata uang lokal, melepas pengendalian atas sistem-sistem harga sebagaimana perkembangan

perdagangan internal dan eksternal (liberalisasi perdagangan), menghapuskan pembatasan-pembatasan hukum terhadap perusahaan-perusahaan negara privat (privatisasi), menghapuskan monopoli negara dalam produksi dan pemasaran, reformasi kebijakan perbankan, melepaskan pengendalian atas suku bunga, memotong anggaran negara, menghapuskan semua subsidi konsumen dan pengeluaran-pengeluaran sosial, mengurangi uang yang beredar dengan disertai efisiensi upah dan gaji di sektor publik untuk mengendalikan inflasi. Program-program ini adalah program penyesuaian struktural (SAP).

Persyaratan ini agar negara peminjam dapat keluar dari krisis dan membayar kembali pinjamannya berdampak negatif. Jika persyaratan justru berdampak negatif, mengapa IMF dan Bank Dunia terus menerapkan persyaratan tersebut? Harap dicatat bahwa ditentukan oleh satu suara dari Namun, berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang setiap negara anggotanya memiliki hak suara yang sama, hak suara di Bank Dunia dan IMF ditentukan oleh tingkat kontribusi keuangan negara-negara anggota. (Leviza, J. 2009). Alhasil, Amerika Serikat, negara penyumbang keuangan terbesar, mampu memberikan pengaruh yang signifikan dengan voting power yang cukup besar sekitar 20%. (Indrayani, I. 2014). Tak heran jika saya yakin siapapun yang tertarik dengan kondisi ini adalah motifnya sendiri. .

Perdebatan mengenai apakah bantuan dan persyaratannya benar-benar melayani negara-negara penerima atau apakah bantuan dan persyaratannya hanyalah alat bagi pemberi bantuan pembangunan untuk memberikan pengaruh dan manfaat. Perlu diingat bahwa bagi negara pemberi bantuan, pemberian bantuan tidak lepas dari motivasi

politik dan ekonomi. Motif berdasarkan kepentingan politik merupakan motif yang sangat penting dari sudut pandang negara dan lembaga bantuan tersebut, dalam hal ini Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia. Seperti selama Perang Dingin, banyak negara dibantu untuk menjaga diri dari pengaruh komunis dan Soviet dan mampu menegaskan kepentingan mereka. Dari kenyataan yang terjadi, hal itu menghilang. Banyak bantuan diberikan selama dekade 1990-an, tetapi sekali lagi, kesediaan negara tuan rumah untuk mempromosikan mekanisme pasar bebas, membuka ekonomi mereka, dan menerapkan berbagai penyesuaian struktural secara konsisten. Kondisi tertentu yang dipaksakan secara politis diterapkan. pada prinsip kapitalisme.

Jadi jika Anda benar-benar melihatnya, itu menegaskan tanpa keraguan bahwa IMF dan Bank Dunia adalah agen atau agen Amerika Serikat. dalam liberalisasi yang diketahui memiliki dampak buruk bagi negara-negara berkembang.

C Konsep Sistem Ekonomi Liberal, Sistem Ekonomi Sosialis

1. Konsep Sistem Ekonomi Liberal

Sesuai dengan keyakinan Adam Smith bahwa setiap pelaku ekonomi—baik konsumen maupun produsen—harus dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing. (Effendi, S. 2019). Sesuai dengan preferensi dan sumber daya keuangan mereka, konsumen memiliki pilihan untuk menggabungkan konsumsi berbagai barang dan jasa untuk mencapai kepuasan maksimal. Demikian pula, produsen memiliki kebijaksanaan penuh atas teknologi dan input yang akan digunakan selama proses produksi di untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang merupakan usaha yang paling menguntungkan (Sudarsono, 2020). Keyakinan

bahwa setiap orang bebas untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri adalah salah satu prinsip dasar sistem ekonomi liberal Adam Smith. Gagasan bahwa setiap orang bebas untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri adalah salah satu prinsip dasar sistem ekonomi bebas Adam Smith. Perhatikan, karena liberalisme berasal dari Abad Pertengahan, pemahaman saya tentangnya relatif baru. Tentu saja, kamus Plato tidak mengandung istilah kebebasan. mematuhi arahan para pemimpin daripada memberi mereka kebebasan untuk bertindak sendiri. Sangat jelas dari uraian sebelumnya. istilah *laissez-faire* sesuai dengan kolusi antara pengusaha dan penguasa aristokrat selama periode merkantilisme yang melihat hak istimewa dan kekuasaan sosial sebagai warisan. Di satu sisi, Smith percaya bahwa semua penyelenggara negara didorong oleh motif mulia: keinginan untuk berbuat baik bagi negara, berdasarkan konsepsi negara yang ramah dan memaksimalkan kesejahteraan. Namun, dia percaya bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan sebenarnya hanya mengarah pada distorsi ekonomi dan akhirnya inefisiensi. Dia pernah menulis bahwa dia secara pribadi membenci "politisi", yang dia sebut sebagai "binatang licik dan licik", karena intervensi negara kemungkinan besar akan mengganggu aliran ekonomi. Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). Adam • Smith tidak menyukai intervensi pemerintah. Solusi yang diusulkan oleh Smith harus membentuk kelompok non-politik yang dapat mengatur dengan cara tertentu. Kelompok politik harus mendominasi politik dan bukan sebaliknya. Hukum ekonomi membatasi kebebasan bergerak pejabat pemerintah dan politisi. Pada akhirnya, undang-undang ini akan mengurangi peran pejabat pemerintah sebagai pengasuh yang tidak melakukan apa-apa

selain melindungi kepentingan individu dalam masyarakat :) Melindungi masyarakat dari kekerasan dan agresi negara lain Model ekonomi pasar yang (2) melindungi semua warga negara dari penipuan dan pemaksaan/paksaan oleh warga negara lain, dan (3) membangun dan memelihara infrastruktur publik dan berbagai lembaga publik semata-mata untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran spontan.

Karena banyaknya pemain (konsumen dan produsen), pangsa pasar dan kekuatan pemain individu sangat kecil. Melalui model yang dikembangkan oleh Classic, pasar mampu menggunakan kekuatan dengan dua cara. (Sawarjuwono, & Kadir, 2003). Pertama, karena semua pelaku ekonomi dihadapkan pada lingkungan yang dibentuk oleh pilihan sukarela, dan banyak yang 'diberikan' dari sudut pandang pelaku (faktor harga, teknologi, atau sumber daya dan kebutuhan), terlalu sedikit. Ruang yang menentukan dan sangat terbatas untuk tindakan strategis. Kedua, tidak ada aktor yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup (modal, tenaga kerja, komoditas) untuk mempengaruhi aktor lain. Karena dua alasan ini, model pasar liberal klasik dari persaingan sempurna menyisakan sedikit ruang untuk membangun kekuatan. Model pasar persaingan sempurna didasarkan pada asumsi bahwa ada banyak pembeli, penjual, dan pekerja. (Wijaya, T. 2020). Dalam situasi seperti itu, masuk ke pasar sangat mudah sehingga tidak mungkin terjadi koalisi antara konsumen, penjual dan pekerja. Penyesuaian ekonomi bersifat instan dan segera. Siapa pun yang menetapkan laba atau sewa di atas rata-rata akan segera dirusak oleh persaingan. Dalam situasi seperti itu, agen tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi parameter

ekonomi makro (tingkat harga umum atau permintaan agregat) atau perilaku agen atau agen lainnya. Teknologi, selera, produksi perusahaan lain, distribusi kekayaan semuanya diberikan. Satu-satunya yang tersisa bagi perusahaan adalah menyesuaikan layanan yang ditawarkan dengan tingkat harga yang ditentukan oleh pasar, namun jelas bahwa negara menolak intervensi dalam proses ekonomi (produksi dan penjualan). Meski menentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian, Smith percaya akan pentingnya akuntabilitas negara untuk pertahanan, keadilan, pekerjaan umum, dan lembaga publik. (Utami, I. W. P. 2015).

2. Konsep Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi disebut sebagai sosialisme. Ini adalah sistem sosial di mana setiap orang berbagi kepemilikan atas alat produksi dan distribusi dan didasarkan pada gagasan komunitas atau solidaritas. (Supriyanto, D. 2016). Dalam masyarakat sosialis, koeksistensi adalah penting, dan komunisme adalah satu dari bentuknya yang paling ekstrim. Dalam komunisme, keputusan ekonomi dibuat, direncanakan, dan dikendalikan oleh negara pada saat yang bersamaan. Banyak orang berpikir bahwa sosialisme identik dengan ajaran Marx (lihat Marxisme). Karena jauh sebelum Marx sudah ada ide dan gagasan tentang simbiosis dan kolektivisme. A. Sosialisme Pra-Marxian Pertama, mari kita lihat pemikiran sosialis pra-Marxis. Baik itu yang dulunya merupakan "utopia" maupun ide dan gagasan yang terealisasi untuk membentuk sebuah komunitas. Kata "utopia" diciptakan oleh Thomas More (1478-1535), dan isinya adalah gagasan tentang "masyarakat sempurna" yang hidup dalam komunitas. Namun, sekitar 380 SM rancangan utopia pertama dibuat. Plato menulis dalam sebuah buku berjudul

"Repubblica" dalam bahasa Yunani kuno. Dalam buku ini, Plato memproklamasikan bentuk pemerintahan ideal yang dirancang, diatur, dan dikendalikan oleh para filsuf. Menurutnya, mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu Plato merekomendasikan bahwa negara harus dijalankan oleh politisi yang berpendidikan dan dipersiapkan dengan baik. (Segara, N. N. Y. 2016). Politisi yang memimpin negara memiliki kekuasaan yang besar, dan mereka harus membuat peraturan untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kekuasaan yang mereka pegang untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga mereka. Aturan main yang dikemukakan oleh Plato menyatakan bahwa mereka yang bekerja untuk negara tidak memiliki hak milik. Namun, dia dan istri serta anak-anaknya adalah orang biasa dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga semua kebutuhan mereka dan keluarganya ditanggung oleh negara. Sistem pemerintahan yang dianjurkan oleh Plato adalah totaliter, sistem pemerintahan yang dijalankan dan dikendalikan sepenuhnya oleh "kelompok orang yang cerdas dan terpilih". (Sundaram, J. K., & Reinert, E. S, 2005)

Deliarnov, dalam "Development of Economic Thought" (2005), mencatat bahwa pemikir pra-Marx bersama Plato memprakarsai cara hidup kolektif, termasuk Sir Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington. . Thomas More, dalam bukunya *Utopia* (1516), berarti "tanah impian" dan membayangkan suatu bentuk kehidupan komunal di sebuah komune di mana semua orang tinggal di tempat yang sama. Setiap orang dalam kelompok masyarakat hidup dengan seragam sederhana, dan anggota kelompok tidak membutuhkan uang, emas, atau perak. Setiap

orang bekerja untuk setiap orang. Sistem pemerintahan yang dibayangkan More terdiri dari 4.444 pemerintahan "demokratis", dipimpin oleh pemimpin yang dipilih seumur hidup oleh 4.444 orang. Perlu dicatat bahwa sosialisme yang diinginkan Thomas More tidak ada dalam kenyataan, tetapi hanya dalam bentuk gagasan yang ditulis dalam buku. Dalam karya-karya Campanella *Civitas Solis* atau *Kota Matahari*, kita bisa menelusuri gagasan tentang bentuk-bentuk ideal bangsa lainnya dalam bentuk tulisan. terdiri dari rumah-rumah, selain sosialisme utopis, ada juga partai-partai politik yang memprakarsai dan merealisasikan upaya mendirikan koperasi dan membangun Catatan sejarah menunjukkan bahwa Robert Owen (1771-1858) adalah orang pertama yang mewujudkan gagasan mendirikan komunitas.

D. Sosialisme Marx

Tokoh yang paling berpengaruh dalam kelahiran konsepsi ekonomi sosialis adalah Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engel (1820-1895), dua tokoh yang paling berpengaruh pada abad ke-19, dua orang revolusioner intelektual. abad. Tulisan-tulisan Marx cukup dikenal dan masih dijadikan referensi oleh para sarjana hingga saat ini. Perjuangan kelas merupakan subjek penting dalam pandangan Marxis. Salah satu tulisan Marx dan Engels yang paling terkenal dalam *Manifesto Komunis* menyatakan, "Sejarah semua masyarakat yang pernah ada adalah sejarah perjuangan kelas" (Newell, 2017). Ini adalah studi serius tentang keadaan masyarakat saat itu, apakah perkembangan teknologi masa depan akan memperkaya kehidupan masyarakat. Akibatnya, tujuan akhir dari semua ini adalah untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada massa. Kaum Marxis, yang ingin memastikan kesejahteraan pekerja, bagaimanapun, selalu

dengan hati-hati memeriksa dampak dari kemajuan teknologi ini. Karena Meningkatkan produktivitas sangat penting bagi pebisnis dan orang-orang dalam bisnis, bagaimana bisnis dapat bekerja dengan segala efisiensi yang ada, termasuk menggunakan mesin yang secara otomatis mengurangi jumlah pekerja?

KESIMPULAN

Kebijakan ekonomi yang diperkenalkan di Hindia Belanda pada awal abad ke-19 merupakan hasil perdebatan panjang antara kaum konservatif dan liberal di Belanda. mula-mula konservatif menang dengan diperkenalkannya budaya, yang terbukti sangat cocok untuk mengatasi masalah keuangan saat itu. Ekonomi merupakan suatu pendekatan yang ditunjuk untuk mengidentifikasi hasil dari fungsi sosial tertentu terlepas dari fungsi yang lainnya yang bukan fungsi ekonomi. Sosiologi ekonomi menggambarkan aspek positif dari ekonomi liberal dan ekonomi nasional. Rtinya yaitu, kami memperkenalkan aspek tradisional yang dapat berkontribusi untuk memahami proses diferensiasi dan integritas. Dengan adanya ekonomi liberal dan ditetapkannya ekonomi liberal di Indonesia, terdapat pula dampak dari ekonomi liberal tersebut, terutama pada pedesaan di Jawa. Berbeda dengan berbagai industri perkebunan yang besar yang ada di Jawa yang juga berkembang pesat pada masa era liberal dan sangat memberikan keuntungan bagi pengusaha swasta Belanda dan pemerintah colonial, tingkat kemakmuran rakyat Indonesia khususnya di pulau Jawa justru semakin meningkat dan juga menurun di waktu yang bersamaan.

Adam Smith berpendapat bahwa semua pelaku ekonomi-baik konsumen maupun produsen-harus dapat mengejar kepentingan masing-masing (Harahap & Ridwan, 2016) Berdasarkan preferensi dan sumber keuangan

mereka, konsumen bebas memilih dari berbagai kombinasi konsumsi yang memaksimalkan kepuasan. Menurut perspektif liberal, individu, bukan negara, yang bertanggung jawab untuk memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka .

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prenada Media.
- Harahap, I., & Ridwan, M. (2016). *The Handbook Of Islamic Economics*.
- Indrayani, I. (2014). International Monetary Fund (IMF) dan Penanggulangan Krisis Moneter di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 38(38), 4291-4310.
- Leviza, J. (2009). *Tanggung Jawab Bank Dunia Dalam IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Sofimedia, Jakarta.
- Nasution, Z. (2008). Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan Umum "lebak Lebung". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2).
- Newell, P. E. (2017). *Komunisme Primitif Hingga Komunisme Libertarian*. Daun Malam.
- Petras, J., & Veltmeyer, H. (2001). *Globalization unmasked: Imperialism in the 21st century*. Zed Books.
- library research). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 5(1), 35-57.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147-158.
- Harahap, H. U. (2023). Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 395-405.
- Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual capital: Perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah
- Segara, N. N. Y. (2016). Filsafat Politik Kautilya Dalam Arthasastra. *Pasupati*, 2(1), 5-24.
- Sudarsono, H. (2020). *Manajemen Pemasaran*. Pustaka Abadi.
- Sundaram, J. K., & Reinert, E. S. (Eds.). (2005). *The origins of development economics: how schools of economic thought have addressed development*. Zed Books.
- Supriyanto, D. (2016). Ekonomi Islam VS Ekonomi Liberal. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 4(2), 40-57.
- Wijaya, T. (2020). Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1-16.
- Utami, I. W. P. (2015). Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 51-63.